



PNS Badung Naik Gaji Rp 97 Miliar

Sebut untuk Kesejahteraan Pegawai

MANGUPURA - Tak hanya pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Badung kembali dimanjakan dengan kenaikan tunjangan dan gaji selangit. Padahal, jika dilihat dari kinerja pegawai setahun terakhir sangat normatif dan biasa-biasa saja. Sangat jarang ada terobosan inovatif yang dibuat para pegawai dan pejabat di Badung.

Data yang diperoleh koran ini menyebutkan bahwa pada tahun 2016 mendatang, belanja pegawai di kabupaten terkaya di Bali itu dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun lebih. Persisnya Rp 1.282.788.915.634. Jumlah itu naik Rp 97,9 miliar, dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1.184.855.507.550

► **Baca Gaji...** Hal 31

Kenaikan Gaji PNS Badung

- Anggaran untuk PNS tahun 2015 sebesar Rp 1.184.855.507.550
- Anggaran 2016 mendatang dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun lebih. Persisnya Rp 1.282.788.915.634 atau naik Rp 97,9 miliar atau kenaikan sebesar 8,27 persen karena termasuk gaji ke-13 PNS
- Alasan kenaikan dinilai sudah sesuai kajian untuk belanja pegawai dan sesuai arahan pusat PP No.30 tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil direncanakan mengalami kenaikan 7 hingga 7,5 persen. Penganggaran gaji ke-13 dan ketiga, penganggaran belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan berkala sesuai Permendagri No.52 tahun 2015

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Senin, 3 Agustus 2015

Hal. : 21



Sambungan - - -

Mengaku Sudah Ikuti Arahan Pusat

GAJI...

Sambungan dari hal 21

Kabag Keuangan Setda Badung, Ketut Gede Suyasa menjelaskan, kenaikan belanja pegawai di Kabupaten Badung tahun 2016 sebesar 8,27 persen. Kenaikan tersebut didasari pada aturan pemerintah pusat, yakni Permendagri No.52 Tahun 2015. "Jadi, semua ini ada aturannya. Yakni,

kebijakan pusat yang bertujuan meningkatkan kinerja sekaligus peningkatan kesejahteraan pegawai," papar Suyasa.

Bukannya ketentuan kenaikan belanja pegawai hanya 5 sampai 7 persen? Ditanya begitu, Suyasa menjelaskan bahwa khusus di Badung kenaikan sebesar 8,27 persen karena termasuk gaji ke-13 PNS. Maka, lanjut Suyasa, kenaikan belanja pegawai di Ba-

dung terlihat cukup besar.

Sementara itu, Sekda Badung Kompyang R Swandika saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, kenaikan belanja pegawai karena pemerintah ingin membuat pegawai lebih sejahtera. Dengan pegawai semakin sejahtera, maka akan berpengaruh pada kualitas kinerja para pegawai. "Sudah ada kajian untuk belanja pegawai ini. Namun,

semua ini karena kami mengikuti arahan dan aturan pusat," jelas Kompyang.

Disisi lain, Bupati Badung AA Gde Agung saat sidang paripurna dewan tak menampik kenaikan belanja pegawai di Badung, bahkan kenaikan hingga 14 persen pada 2016.

Dalam peraturan tersebut menurut Gde Agung penganggaran belanja pegawai mem-

perhatikan tiga hal. Pertama, penganggaran untuk gaji dan tunjangan disesuaikan dengan peraturan perundangan. Tahun ini sesuai dengan PP No.30 tahun 2015 tentang perubahan ke-17 atas PP No. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil direncanakan mengalami kenaikan 7 hingga 7,5 persen. Kedua, penganggaran untuk gaji ke-13, dan ketiga, penganggaran belanja pegawai untuk mengantisipasi kenaikan berkala sesuai amanat Permendagri No.52 tahun 2015 yang menentukan agar dianggarkan 2,5 persen dari belanja pegawai.

Yang menarik, Gde Agung mengklaim jika postur APBD Badung lebih dominan pada belanja langsung dengan anggapan belanja langsung akan langsung dapat dinikmati masyarakat.

"Saya katakan demikian, karena dari tahun ke tahun, struktur APBD ditetapkan porsi belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung," kata bupati yang tinggal 2 hari lagi mengakhiri masa jabatannya itu.

Hal ini, katanya, di dalam alokasi belanja tidak langsung terdapat cukup besar belanja yang juga dinikmati langsung

masyarakat. Bentuknya berupa subsidi, hibah, bansos, belanja tidak terduga, bagi hasil kepada pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada provinsi dan enam kabupaten di Bali.

Gde Agung juga menyangkal adanya kesan setiap kenaikan APBD selalu diikuti dengan kenaikan belanja aparatur. "Ini adalah sebuah kesan yang keliru," tegasnya. Kenapa bisa keliru? Katanya, penentuan alokasi anggaran kegiatan atau alokasi belanja dalam APBD didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang mengacu kepada aturan yang berlaku. (san/pit)